

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Chomzah, Ali Achmad. 2002. *Hukum Pertanahan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Faud, Muhammad dkk. 2006. *Penggunaan Bahasa Indonesia Laras Ilmiah*. Yogyakarta: Ardana Media.
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. Gramedia: Jakarta.
- Harsono, Boedi. 2002. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukumhukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Hermit, Herman. 2004. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*. Bandung: Mandar Maju.
- Kartasapoetra, G. dkk. 1991. *Hukum-hukum Tanah. Jaminan UUPA Bagi keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- 1992. *Masalah Pertanahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Perangin, Efendi. 1986. *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Jakarta: Cv, rajawal.
- Rachman, Maman. 1999. *Srategi dan Langkah-langkah Penelitian*.
- Saleh, K. Wantjik. 1977. *Hak Anda Atas Tanah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Santoso, Nanda. 1996. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*. Surabaya: Fajar Mulya.
- Santoso, Urip. 2005. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Sumardjono, Maria Sw. 1998. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. Yogyakarta: Buku Kompas.

## **B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agrari.*

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 *tentang Pendaftaran Tanah.*

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 *tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pertanahan nasional.*

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 *tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.*

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 tahun 2001 *tentang Alih Fungsi Lahan Dari Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK) Seluas +/- 145.125 Hektar Menjadi Kawasan Bukan( HPK) Dalam Rangka Pemberian Hak Atas Tanah.*

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 tahun 2001 *tentang Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Eks Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Di Provinsi Lampung.*

Instruksi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Nomor: 07 Tahun 2009 *tentang Petunjuk Pelaksanaan Pensertifikatan Tanah Massal Swadaya Masyarakat Tahun Anggaran 2009.*

Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor:48/KPTS/01/2005, *Tentang Tim pelaksana Konversi Kawasan Hutan Produksi Register 08 Way Rumbia, Seputih Surabaya, Dan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.*

Keputusan Kepala Kampung Bina Karya Putra Nomor: 01/KPTS/2009 *tentang Kepengurusan Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan (Pokmasdartibnah) Kampung Bina Karya Putra Tahun 2009.*

Peraturan Kampung Bina Karya Putra Nomor: 01 Tahun 2009 *tentang Pembuatan Sertifikat Tanah Ex Register 08 Way Rumbia Melalui Program Pensertifikatan Tnah Massal Swadaya Masyarakat.*

Keputusan Kepala Kampung Bina Karya Putra Nomor: 02/KPTS/2009 *tentang Panitia Pelaksana Pembuatan Sertifikat Tanah Ex Register 08 Way Rumbia Program Massal Swadaya Masyarakat Tahun 2009.*